



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pembangunan Tanggul Laut Terhambat Permukiman

Pemerintah harus merelokasi penduduk yang tinggal di lokasi pembangunan tanggul.

### Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

**JAKARTA** – Pemerintah DKI Jakarta terseok dalam menuntaskan rencana Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A. Strategi di fase A ini adalah memperkuat dan meninggikan tembok laut (tanggul) yang ada. Namun pembangunan tanggul belum bisa dilanjutkan karena terhambat oleh kendala penduduk yang tinggal di lokasi pembangunan.

“Ada masyarakat yang tinggal di sana. Kami harus relokasi dulu ke tempat lain,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juaini Yusuf kemarin. “Tahu alat-alat berat dan material juga susah masuk karena aksesnya melintasi pasar masyarakat yang padat. Mau tidak mau bawanya lewat jalur laut.”

Pembangunan tanggul dalam fase A ini telah ditetapkan sepanjang 46,2 kilometer. Dari beban total itu, pemerintah Jakarta hanya bertanggung jawab untuk membangun sepanjang 6,75 kilometer di

tiga kawasan, yaitu Muara Angke, Sunda Kelapa, dan Kali Blencong.

Menurut Juaini, di lokasi yang menjadi target pembangunan itu terdapat permukiman. Permukiman tersebut adalah Kali Dadap, Pantai Kamal Muara, Kali Adem, dan Muara Kali Angke. Saat ini pemerintah Jakarta masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melancarkan relokasi penduduk. “Sedang dihitung luas hunian dan jumlah keluarga,” ujar dia.

Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) pada Juli lalu masih menyelesaikan proses sertifikasi lahan di sejumlah lokasi di Jakarta Utara. Di antaranya adalah mengukur lahan yang akan digunakan untuk pembangunan NCICD. Lahan itu nantinya menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Juaini mengatakan, persoalan baru juga muncul setelah pemerintah pusat memutuskan pembangunan tanggul di titik kritis tak akan melibatkan

pihak swasta. Padahal, dalam perencanaan, pihak swasta akan diminta untuk menuntaskan pembangunan tanggul hingga 14,6 kilometer.

“Terakhir, jatah swasta akan dibagi dua ke pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Tapi belum tahu kami bertambah berapa panjang dan di mana saja lokasinya,” kata Juaini.

Hal ini juga berdampak pada alokasi anggaran Dinas SDA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Menurut Juaini, dinasny belum meminta penambahan dana untuk pembuatan tanggul di lokasi baru. Dia mengklaim dana akan dimohonkan langsung dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta setelah ada keputusan soal lokasi dan panjang tanggul baru. “Di KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2020 belum masuk,” ujar Juaini.

Hingga berita ini ditulis,

pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terlibat dalam proyek NCICD belum memberikan jawaban detail. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Bambang Hidayah, menilai proyek tersebut sudah masuk dalam teknis pelaksanaan di lapangan. Dia juga tak berkomentar tentang alasan penghapusan peran pihak swasta dalam proyek darurat tersebut. “Langsung ke PTPIN saja,” kata dia.

Adapun Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan PTPIN, Ferdinanto, mengklaim telah menyiapkan semua informasi untuk diberikan kepada masyarakat melalui media. Tapi dia membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan tim guna merespons sejumlah pertanyaan yang dikirimkan *Tempo*. “Saya atur jadwal dengan tim. Kalau bisa datang saja ke kantor, biar jawabannya mantap,” kata Ferdinanto.